



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cibeunying Kaler selaku unsure pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingindicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Cibeunying Kaler

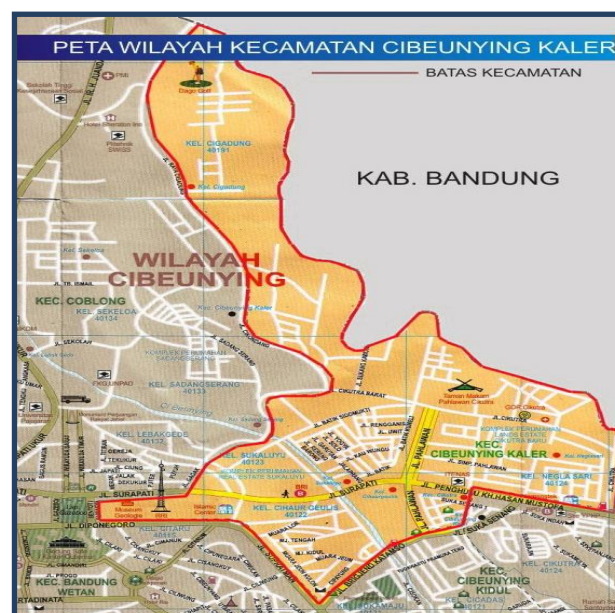
Kecamatan Cibeunying Kaler dibentuk berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Kecamatan Cibeunying Kaler terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Cihaurgeulis
2. Kelurahan Sukaluyu
3. Kelurahan Neglasari
4. Kelurahan Cigadung

Kecamatan Cibeunying Kaler meliputi luas wilayah 449,42 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 66.710 Jiwa. Untuk kepentingan administrasi kependudukan 4 (empat) Kelurahan tersebut terdiri dari 46 Rukun Warga, dan 290 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler terdiri dari tanah darat. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan.

Peta Wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung





C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

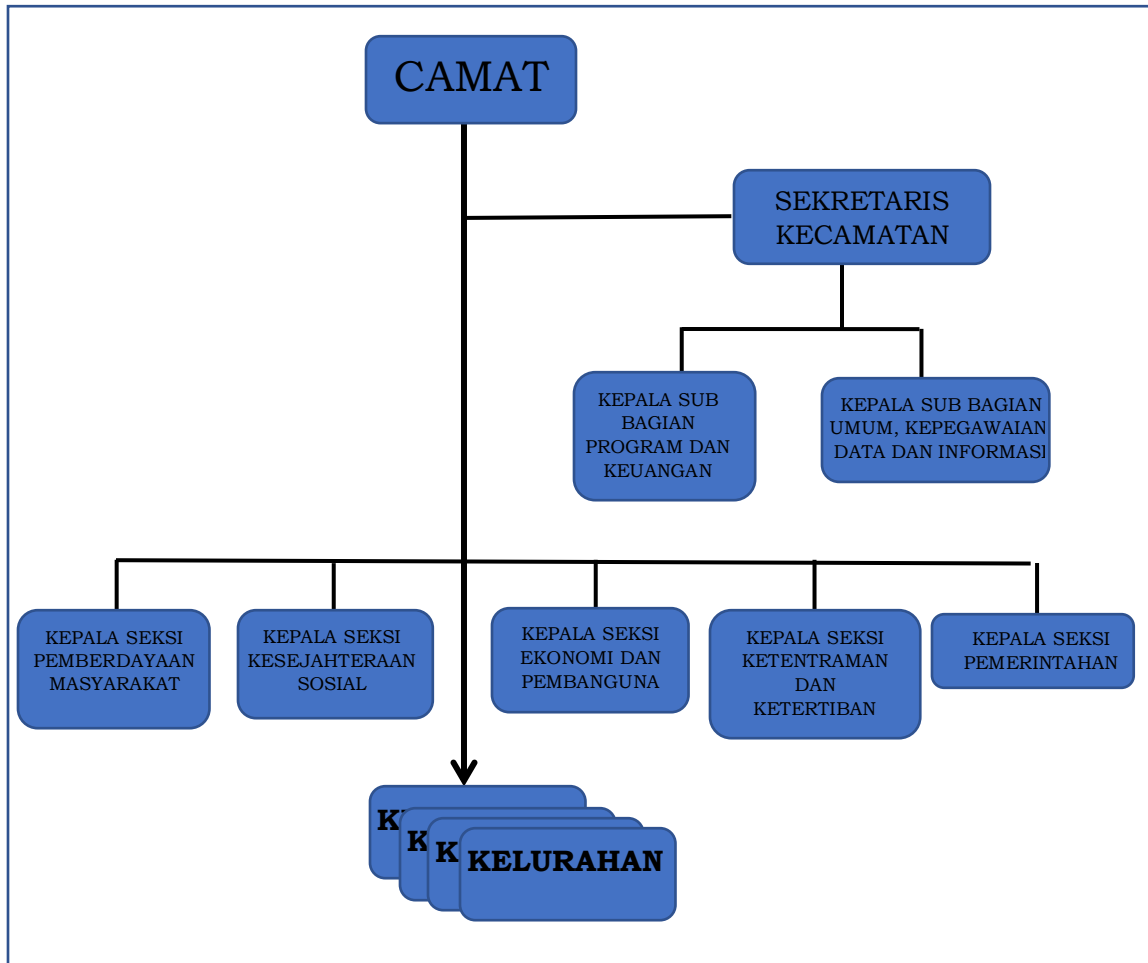
Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cibeunying Kaler mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan kecamatan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. SUARDI, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagai mana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Isu Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagai mana sasaran yang telah dicanangkan adalah



peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebihtransparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.



Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah



dan system pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD



untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Cibeunying Kaler	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler	80	86,3	86,3	86,4	86,4
2		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan	Persentase Kelurahan Unggul	50	50	50	75	75



		lingkungan						
3	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan Unggul	23.1	24.3	24.6	25.01	25.3

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NILAI	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying kaler	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying kaler	80	Nilai	IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 14 / 2018)	Responden adalah Warga masyarakat yang dilayani.
2	Meningkatnya peran	Persentase Kelurahan	50	%	Merupakan PK	% kelurahan	Kasi-kasi Kelurahan dan



	kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Unggul			Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	23.	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
Tahun 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying kaler	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying kaler	Nilai	80
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	23.1



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cibeunying Kaler.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja



sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeunying Kaler berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/Kep.09-Cibkal/2018 tanggal 28 Maret 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu



dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler	Nilai	80	86.56	108.20
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	23.1	14.82	64.16

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler, dengan capaian kinerja 108.2 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, dengan capaian kinerja 64.16 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler	Nilai	80	86.56	108.20
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	23.1	14.82	64.16

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	25.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	4	1	25.00	2	50.00	1	0.00
	Jumlah	2	1	25.00	2	50.00	25.00	0.00



Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 2	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	25.00 %
2	Sesuai Target	2	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	25.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public Kecamatan Cibeunying Kaler



Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
Kecamatan Cibeunying Kaler

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler	Nilai	80	86.56	108.20	86.3			86.3			86.4			86.4		
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu		100	100	100	100			100			100			100		

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai berikut :

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibeunying Kaler merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Instrumen atau cara pengukuran Indikator

Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan 9 unsur sesuai Permenpan 14 Tahun 2017. Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Kepuasan Masyarakat.

Untuk pengukuran Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu pada akhir tahun 2019 dilakukan pengukuran melalui perhitungan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan seluruh jumlah temuan.

Kinerja nyata dengan rencana

Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler adalah sebesar 86.56 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, sehingga kenaikan nilai sebesar 6,56 atau persentase capaian kinerjanya adalah 108.20 % atau capaiannya melebihi/melampaui target yang telah diperjanjikan sebesar 8.86 %.

Sedangkan capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%.

**Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya**

Bila realisasi capaian kinerja nyata indikator Rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler sebesar 86.56 dari target sebesar 80 dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 86.28 dengan target 84.5 maka kinerja nyata pada tahun 2019 mengalami kenaikan Rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler sebesar 0.28 berarti kinerja nyata mengalami kenaikan nilai sebesar 0.28 dan untuk persentase pencapaiannya mengalami kenaikan sebesar 6.08 %.

Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan

Bila realisasi capaian kinerja nyata indikator Rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler sebesar 86.56 dari target sebesar 80 bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 86.4 maka capaian kinerja sebesar 100.19 % .

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya

Bila rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler sebesar 86.56 dari target 80 dengan capaian kinerja sebesar 108,2 %, bila dibandingkan dengan instansi/kecamatan lain yang memiliki tupoksi yang sama dengan kultur penduduk yang tidak jauh berbeda seperti kecamatan Coblong yang rata rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan sebesar 87,05 dari target 80 dengan capaian nilai sebesar 108,81.

Output program/kegiatan dan keuangan

Rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Cibeunying Kaler sebesar 86.56 dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang telah terserap sebesar Rp. **5,731,706,200,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	s.d Triwulan 4		
			Realisasi	%	
1	2	3	6	7	
Sasaran 1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kaler				
1	Program pelayanan administrasi perkantoran				
	11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan)	149,398,255	129,715,898	86.83
	12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Cihaurgeulis)	18,619,734	17,273,812	92.77
	13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Sukaluyu)	24,111,725	16,486,124	68.37
	14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Neglasari)	32,480,035	24,768,775	76.26
	15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Cigadung)	45,001,003	33,094,989	73.54
	16	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kecamatan)	14,058,000	5,478,700	38.97
	17	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,436,400	1,333,900	54.75



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	s.d Triwulan 4	
			Realisasi	%
1	2	3	6	7
	(Kelurahan Neglasari)			
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Kelurahan Cigadung)	1,853,550	1,259,600	67.96
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kecamatan)	49,371,000	39,600,000	80.21
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kecamatan)	14,151,500	14,080,288	99.50
111	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kelurahan Cihargeulis)	4,500,000	4,400,000	97.78
112	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kelurahan Sukaluyu)	4,400,000	4,185,000	95.11
113	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kelurahan Neglasari)	4,600,000	4,600,000	100.00
114	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kelurahan Cigadung)	5,000,000	3,860,000	77.20
115	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kecamatan)	71,056,007	71,047,000	99.99
116	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kelurahan Cihargeulis)	15,275,606	15,268,300	99.95
117	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kelurahan Sukaluyu)	20,818,197	19,119,600	91.84
118	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kelurahan Neglasari)	17,745,666	17,744,500	99.99
119	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kelurahan Cigadung)	13,119,890	13,111,200	99.93
12	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan)	21,617,866	21,607,650	99.95
121	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Cihargeulis)	11,142,624	11,120,000	99.80
122	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Sukaluyu)	13,213,790	13,026,900	98.59
123	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Neglasari)	20,180,400	19,930,600	98.76
124	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Cigadung)	14,999,948	12,303,500	82.02
125	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan)	4,387,070	4,386,236	99.98
126	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Cihargeulis)	3,274,950	3,253,000	99.33
127	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Sukaluyu)	2,159,759	2,152,500	99.66
128	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Neglasari)	5,196,250	5,180,900	99.70
129	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan	5,036,500	4,501,400	89.38



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	s.d Triwulan 4	
			Realisasi	%
1	2	3	6	7
	Cigadung)			
13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan)	168,184,610	160,788,615	95.60
131	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Cihaurgeulis)	179,813,029	175,530,500	97.62
132	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Sukaluyu)	25,157,856	23,306,850	92.64
133	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Neglasari)	39,785,850	36,131,040	90.81
134	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Cigadung)	126,232,597	116,119,300	91.99
135	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan)	18,025,910	18,024,500	99.99
136	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Cihaurgeulis)	1,997,600	1,827,000	91.46
137	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Sukaluyu)	4,681,000	4,664,500	99.65
138	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Neglasari)	5,672,585	5,652,800	99.65
139	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Cigadung)	9,952,000	9,790,700	98.38
14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan)	8,016,000	6,481,000	80.85
141	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan Cihaurgeulis)	2,980,000	1,305,000	43.79
142	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan Sukaluyu)	1,836,000	1,200,000	65.36
143	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan Neglasari)	3,876,000	3,876,000	100.00
144	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan Cigadung)	5,016,000	3,970,000	79.15
145	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kecamatan)	60,703,500	60,497,950	99.66
146	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kelurahan Cihaurgeulis)	29,306,400	29,281,631	99.92
147	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kelurahan Sukaluyu)	69,857,300	67,638,150	96.82
148	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kelurahan Neglasari)	16,137,000	15,733,675	97.50
149	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kelurahan Cigadung)	30,335,000	30,152,440	99.40



No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2019	s.d Triwulan 4	
				Realisasi	%
1	2		3	6	7
15	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kecamatan)		20,000,000	20,000,000	100.00
151	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran (Kecamatan)		360,000,000	360,000,000	100.00
Total Sasaran			1,796,771,962	1,138,736,886	63.38
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kecamatan)		68,401,727	67,869,117	99.22
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kelurahan Cihaurgeulis)		251,001,086	246,980,782	98.40
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kelurahan Sukaluyu)		5,312,627	5,285,000	99.48
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kelurahan Neglasari)		77,832,276	77,539,100	99.62
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kelurahan Cigadung)		49,999,999	49,542,410	99.08
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kecamatan)		243,479,872	218,422,112	89.71
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kelurahan Cihaurgeulis)		61,356,000	58,533,600	95.40
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kelurahan Sukaluyu)		85,208,540	68,074,200	79.89
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kelurahan Neglasari)		64,157,000	56,512,500	88.08
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kelurahan Cigadung)		62,887,900	59,597,195	94.77
Total Sasaran			969,637,027	908,356,016	93.68
3	Program peningkatan disiplin aparatur				
31	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Kecamatan)		61,346,934	55,390,000	90.29
Total Sasaran			61,346,934	55,390,000	90.29
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
41	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur		94,600,000	92,620,000	97.91
Total Sasaran			94,600,000	92,620,000	97.91
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum				



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	s.d Triwulan 4	
			Realisasi	%
1	2	3	6	7
51	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kecamatan)	171,052,402	170,550,202	99.71
52	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Cihaurgeulis)	499,719,279	499,487,956	99.95
53	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Sukaluyu)	724,213,725	678,719,500	93.72
54	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Neglasari)	1,944,064,988	1,936,670,815	99.62
55	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Cigadung)	933,393,640	820,476,757	87.90
56	Pemeliharaan RTH Kecamatan (Kecamatan)	54,604,835	54,206,100	99.27
57	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan (Kecamatan)	17,335,150	17,222,900	99.35
Total Sasaran		4,344,384,019	4,177,334,230	96.15
6	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan			
61	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan (Kecamatan)	127,628,506	126,151,250	98.84
62	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan (Kelurahan Cihaurgeulis)	146,800,000	146,755,000	99.97
63	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan (Kelurahan Sukaluyu)	42,000,000	42,000,000	100.00
64	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan (Kelurahan Cigadung)	41,864,840	31,576,120	75.42
65	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kecamatan)	48,818,000	48,770,000	99.90
66	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Cihaurgeulis)	316,800,000	316,800,000	100.00
67	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Sukaluyu)	397,200,000	397,200,000	100.00
68	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Neglasari)	188,400,000	188,400,000	100.00
69	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Cigadung)	442,570,000	423,615,850	95.72
Total Per Sasaran		1,752,081,346	1,406,361,970	80.27
TOTAL SASARAN 1		8,957,474,354	5,731,706,200	63.99

Faktor Pendorong

Dukungan sarana pelayanan sudah cukup memadai dalam mengakomodir kebutuhan dari pengguna pelayanan maupun peraturan perundang undangan.

Faktor Penghambat



Faktor yang menjadi penghambat penurunan beberapa rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Cibeunying Kaler yang dominan adalah penanganan pelayanan pengaduan. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan unsur penanganan pelayanan pengaduan antara lain :

1. Penyelesaian KTP tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam SOP hal ini disebabkan kurangnya keping KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Melakukan perbaikan SOP.
2. Peningkatan sosialisasi dari ASN maupun pengurus RT RW diwilayah Kecamatan Cibeunying Kaler terkait dengan pelayanan pembuatan KTP.

1. Analisis Pencapaian Indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 adalah sebesar 86.56 dari target sebesar 80 atau capaian kinerja sebesar 108.20. Capaian ini didukung dengan peningkatan kemampuan aparat pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam melayani masyarakat yang semakin baik.

Nilai capaian target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2019 diperoleh dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 pernyataan. Capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini secara nyata dapat menjadi cerminan tentang tingginya kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan di kantor Kecamatan Cibeunying Kaler.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi/Lurah di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Data Perhitungan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

**Kecamatan Cibeunying Kaler 2019**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (NR)	NR Tertimbang Per Unsur
1	Persyaratan	3.46	0.38
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.44	0.38
3	Waktu Penyelesaian	3.34	0.37
4	Biaya/Tarif	3.97	0.44
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.35	0.37
6	Kompetensi Pelaksana	3.39	0.38
7	Perilaku Pelaksana	3.47	0.39
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.21	0.36
9	Sarana dan Prasarana	3.55	0.39
Nilai Indeks (Jumlah NR Tertimbang per Unsur)			3.46
Indeks Kepuasan Masyarakat			86.56

Dari hasil jawaban responden mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kelurahan maupun kecamatan di Kecamatan Cibeunying Kaler dapat dianalisis berdasarkan Nilai unsur pelayanan dari hasil jawaban responden, sebagai berikut

1. Indikator Persyaratan mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.46, artinya persyaratan pelayanan yang diberikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Masyarakat sudah merasa sangat puas terhadap persyaratan pelayanan yang diberikan. Persyaratan pelayanan ini sebelumnya sudah disosialisasikan dengan baik oleh Kelurahan maupun Kecamatan melalui RT/RW maka masyarakatpun akan dapat dengan mudah mempersiapkan baik dari sisi administrasi maupun teknisnya.
2. Indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur mendapatkan nilai unsur Pelayanan sebesar 3.44. Artinya masyarakat sudah memahami prosedur dengan mudah. Hal ini dikarenakan adanya informasi yang jelas dari pihak Kelurahan maupun Kecamatan baik berupa papan pengumuman maupun informasi yang lain yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan ini. Adanya keterbukaan informasi



- mengenai prosedur pelayanan, kejelasan alur dalam prosedur pelayanan dan kesederhanaan prosedur pelayanan, menjadikan warga masyarakat menjadi puas terhadap pelayanan di Kelurahan/Kecamatan.
3. Indikator waktu penyelesaian mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.34. Nilai ini dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik. Kecamatan Cibeunying Kaler telah menerapkan standar waktu pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan, jadi untuk setiap pelayanan, waktu penyelesaian sudah baku. Selain itu, ditunjang pula oleh jumlah SDM yang memadai sehingga warga menunggu antrian dalam waktu yang cukup wajar. Hal ini mengakibatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
 4. Indikator tarif/biaya mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.97. Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada tarif/biaya dalam mendapatkan pelayanan yang ada di Kelurahan maupun Kecamatan Cibeunying Kaler.
 5. Indikator Produk Spesifik Jenis Pelayanan mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.35. Tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi akan indikator ini menandakan bahwa pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Cibeunying Kaler sudah seperti yang digariskan dalam SOP. Masyarakat sudah merasa puas dengan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
 6. Indikator Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.39. Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat sudah tidak meragukan lagi terhadap kemampuan petugas pelayanan, baik terhadap kemampuan fisik maupun kemampuan intelektual. Kenyataan ini terjadi karena para petugas yang melayani di Kelurahan maupun Kecamatan masih berusia muda dan minimal lulusan SMK yang masih baru.
 7. Indikator Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.47. Berdasarkan hasil jawaban responden ini, dapat disimpulkan bahwa warga mendapatkan perlakuan yang sopan dan ramah dari petugas pelayanan. Selain itu, warga juga menilai tingkat kesopanan antar petugas di Kecamatan Cibeunying Kaler adalah baik.
 8. Indikator Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.21. Angka ini menunjukkan bahwa setiap pengaduan yang diajukan oleh warga masyarakat, mendapat



respon yang cepat dari Kelurahan maupun Kecamatan. Layanan Pengaduan dikelola dengan baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.

- Indikator Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai unsur pelayanan sebesar 3.55. Berdasarkan hasil jawaban responden ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa puas dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kecamatan maupun Kelurahan. Hanya sarana dan prasarana ini harus tetap dipelihara dan ditingkatkan kenyamanannya.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur pelayanan yang mempunyai nilai yang paling rendah. Secara keseluruhan, semua unsur pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kaler mempunyai nilai yang tinggi. Semua unsur bernilai lebih dari tiga, artinya masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Kecamatan lain di kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 3.6
Data Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Seluruh Kecamatan Kota Bandung Tahun 2019

NO	KECAMATAN	IKM		
		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	ANDIR	81.5	84.08	103.17
2	ANTAPANI	80	83.61	104.51
3	ARCAMANIK	80	80.69	100.86
4	ASTANAANYAR	82	84.098	102.56
5	BABAKAN CIPARAY	80.5	82.53	102.52
6	BANDUNG KIDUL	80	88.78	110.98
7	BANDUNG KULON	80	80.02	100.03
8	BANDUNG WETAN	75	77.37	103.16
9	BATUNUNGGAL	80	82.33	102.91
10	BOJONGLOA KALER	78	81	103.85
11	BOJONGLOA KIDUL	80	80.39	100.49
12	BUAH BATU	75	78.23	104.31
13	CIBEUNYING KALER	80	87.09	108.86
14	CIBEUNYING KIDUL	70	79.4	113.43
15	CIBIRU	80	81.77	102.21
16	CICENDO	83.33	85.84	103.01

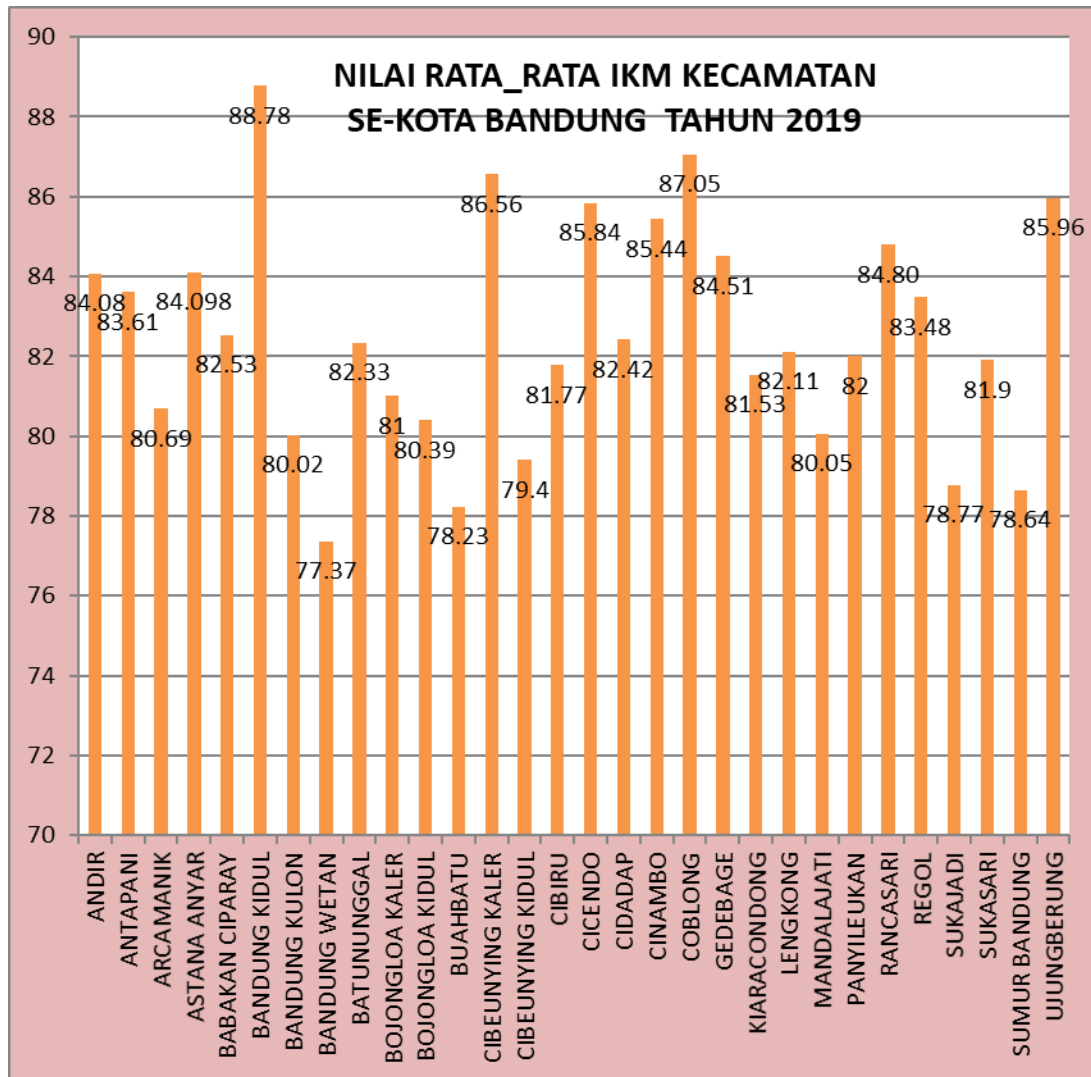


NO	KECAMATAN	IKM		
		TARGET	REALISASI	%
17	CIDADAP	80	82.42	103.03
18	CINAMBO	82.8	85.44	103.19
19	COBLONG	80	87.05	108.81
20	GEDE BAGE	83	84.51	101.82
21	KIARACONDONG	80	81.53	101.91
22	LENGKONG	80	82.11	102.64
23	MANDALAJATI	80	80.05	100.06
24	CIBEUNYING KALER	78	82	105.13
25	RANCASARI	80	84.80	106.00
26	REGOL	80	83.48	104.35
27	SUKAJADI	76	78.77	103.64
28	SUMUR BANDUNG	79.64	81.9	102.84
29	SUKASARI	78	78.64	100.82
30	UJUNG BERUNG	83	85.96	103.57

Berdasarkan data di atas di ketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler menempati urutan ke-3 diantara 30 Kecamatan di Kota Bandung yaitu sebesar 86.56 sedangkan nilai tertinggi capaian indikator kinerja IKM dari 30 kecamatan di Kota Bandung adalah sebesar 88,78 yaitu Kecamatan Bandung Kidul, dan yang terendah yaitu 77,37 Kecamatan Bandung Wetan.

Data perbandingan nilai IKM dari seluruh Kecamatan di Kota Bandung dapat dilihat dalam bentuk diagram dibawah ini:

Gambar 3.1
Diagram Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Seluruh Kecamatan Kota Bandung Tahun 2019



Capaian ini didukung dari peningkatan kemampuan aparat pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang ada di Kecamatan Cibeunying Kaler dalam hal melayani masyarakat yang semakin baik, salah satu contohnya dimana aparat pelayanan lebih responsif dalam menyelesaikan masalah yang ada seputar pelayanan, selain itu petugas pelayanan lebih disiplin dan lebih tanggap menghadapi kendala pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2019
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam
keamanan dan kenyamanan lingkungan



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100	75			75			75			100		

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebagai berikut :

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Merupakan Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat.

Instrumen atau cara pengukuran Indikator

Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan % kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul (Jumlah Kelurahan Unggul dibagi Jumlah semua Kelurahan di Kecamatan Cibeunying kaler). Dimana Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :

1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)
 - Ada kepengurusan
 - Ada program kerja
 - Mengikuti pelatihan
 - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang
 - Melakukan penyuluhan / motivasi kepada masyarakat
2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)
 - Ada Kepengurusan
 - Gardu Sosial
 - Lumbung sosial
 - Peta Rawan Bencana
 - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana
3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)
 - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca
 - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp
 - Koran2 / majalah langganan kelurahan



- Ada laporan pengunjung
4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah
 - petunjuk arah ke masjid
 - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat
 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)
 - SK / SP
 - Ada Program Kerja
 - Monitoring Rawan Jentik
 - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu
 - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)
 - Data terpilah
 - satgas Pengarusutamaan gender (PUG)
 - Pelatihan pelatihan
 - Perlindungan bagi perempuan (KDRT)
 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)
 - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK
 - Memiliki data anak
 - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA
 - Monitoring dan evaluasi
 8. Septic Tank Komunal (Ekbang)
 - Minimal untuk 5 rumah
 - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter
 - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga
 - Menggunakan pipa paralon
 - Menggunakan bak kontrol
 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)
 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)
 - Anggota Koperasi \geq 20 orang
 - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas
 - Memiliki Akte Pendirian
 - Ada usaha simpan pinjam
 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)
Kriteria:
 - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan



- Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan
 - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan
 - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas
 - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering
 - Melakukan penyiraman pada musim kemarau
12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)
- Ada Pengurus
 - Ada Anggota
 - Ada AD/ART
13. Siskamling RW Aktif
- Kriteria Siskamling Aktif :
- Adanya Pengurus
 - Adanya Kelompok Siskamling
 - Adanya Jadwal Siskamling
 - Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
 - Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

Kinerja nyata dengan rencana

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 50% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau capaiannya mencapai target target yang telah diperjanjikan.

Adapun Kelurahan yang memenuhi kriteria Unggul adalah:

1. Kelurahan **Cigadung**, dengan kriteria yang terpenuhi:
 - a. Pojok Baca;
 - b. Menyemarakkan tempat ibadah;
 - c. Minimal 2 kader jumantik;
 - d. Bank sampah; dan
 - e. Satwankar aktif

2. Kelurahan **Neglasari**, dengan kriteria yang terpenuhi:
 - a. Pojok Baca;
 - b. Menyemarakkan tempat ibadah;
 - c. Minimal 2 kader jumantik;
 - d. Bank sampah; dan
 - e. Satwankar aktif

Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya



Bila realisasi capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul sebesar 50% dari target sebesar 50% bisa dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 karena di tahun 2018 tidak ada indikator persentase kelurahan Unggul.

Kinerja Nyata dengan Akhir Tahun Berjalan

Bila realisasi capaian kinerja nyata Persentase Kelurahan Unggul sebesar 50% dari target sebesar 50% bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 50 % .

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya

Bila Persentase Kelurahan Unggul sebesar 50% dari target sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan instansi/kecamatan lain yang memiliki tupoksi yang sama dengan kultur penduduk yang tidak jauh berbeda seperti kecamatan Coblong yang nilai Persentase Kelurahan Unggul sebesar 59.68 dari target 58.89 dengan capaian nilai sebesar 101,34.

Output program/kegiatan dan keuangan

Sebagai kegiatan pendukung tercapainya dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. **2,785,061,395,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Triwulan 4		
			Realisasi	%	
1	2	3	6	7	
Sasaran 2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan				
7	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan				
	71	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kecamatan)	1,052,806,603	1,017,247,980	96.62
	72	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Cihaurgeulis)	186,098,400	186,072,000	99.99
	73	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Sukaluyu)	187,272,055	186,054,500	99.35
	74	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Neglasari)	180,000,000	180,000,000	100.00
	75	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Cigadung)	240,065,065	180,439,100	75.16
Total Per Sasaran		1,846,242,123	1,749,813,580	94.78	
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				
	81	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Kecamatan)	264,772,000	244,755,000	92.44
	82	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Kelurahan)	55,200,000	55,165,000	99.94



No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2019	Triwulan 4	
				Realisasi	%
1	2		3	6	7
		Cihaurgeulis)			
	83	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Kelurahan Sukaluyu)	89,085,120	88,570,400	99.42
	84	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Kelurahan Cigadung)	195,823,900	186,834,422	95.41
Total Per Sasaran			604,881,020	575,324,822	95.11
9	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan				
	91	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Kecamatan)	243,412,867	243,123,960	99.88
	92	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Kelurahan Sukaluyu)	12,650,000	12,030,706	95.10
	93	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Kelurahan Neglasari)	71,950,000	71,703,875	99.66
	94	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Kelurahan Cigadung)	48,185,200	47,843,452	99.29
Total Per Sasaran			376,198,067	374,701,993	99.60
10	Program Pemberdayaan KUMKM				
	101	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan (Kecamatan)	42,365,600	40,394,000	95.35
	102	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan (Kelurahan Sukaluyu)	-	-	0.00
Total Per Sasaran			42,365,600	40,394,000	95.35
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	111	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	44,827,000	44,827,000	0
Total Per Sasaran			44,827,000	44,827,000	100
TOTAL SASARAN 2			2,914,513,810	2,785,061,395	95.56

Faktor Pendorong

Adanya komitmen yang kuat dari aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan untuk mewujudkan janji wali kota, agar tercapai kelurahan yang unggul.

Faktor Penghambat



Kurangnya dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah dalam pembentukan suatu lembaga. Seringkali lembaga hanya dibentuk saja, tidak berkelanjutan. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran, kurangnya dukungan masyarakat.

2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Kelurahan Unggul

Capaian Indikator Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2019 adalah sebesar 50% dari target sebesar 50% atau capaian kinerja sebesar 100. Capaian ini didukung oleh partisipasi masyarakat dan kemampuan aparat kecamatan dan kelurahan dan dukungan dari dinas terkait.

Nilai capaian target Indikator Persentase Kelurahan Unggul untuk tahun 2019 diperoleh dengan menghitung jumlah kelurahan yang memiliki kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler. Capaian kinerja Indikator Persentase Kelurahan Unggul ini secara nyata dapat menjadi cerminan tentang tingginya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Cibeunying Kaler.

Tabel 3.6
Data Perbandingan Persentase Kelurahan Unggul
Seluruh Kecamatan Kota Bandung Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Persentase Kelurahan Unggul		
		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	ANDIR	33.33	100	300.03
2	ANTAPANI	50	50	100.00
3	ARCAMANIK	75	75	100.00
4	ASTANAANYAR	50	50	100.00
5	BABAKAN CIPARAY	50	50	100.00
6	BANDUNG KIDUL	75	78.64	104.85
7	BANDUNG KULON	25	25	100.00
8	BANDUNG WETAN	39.74	23.07	58.05
9	BATUNUNGGAL	25	25	100.00
10	BOJONGLOA KALER	40	100	250.00
11	BOJONGLOA KIDUL	50	50	100.00
12	BUAH BATU	50	47.03	94.06
13	CIBEUNYING KALER	50	50	100.00
14	CIBEUNYING KIDUL	16.67	16.67	100.00
15	CIBIRU	50	50	100.00

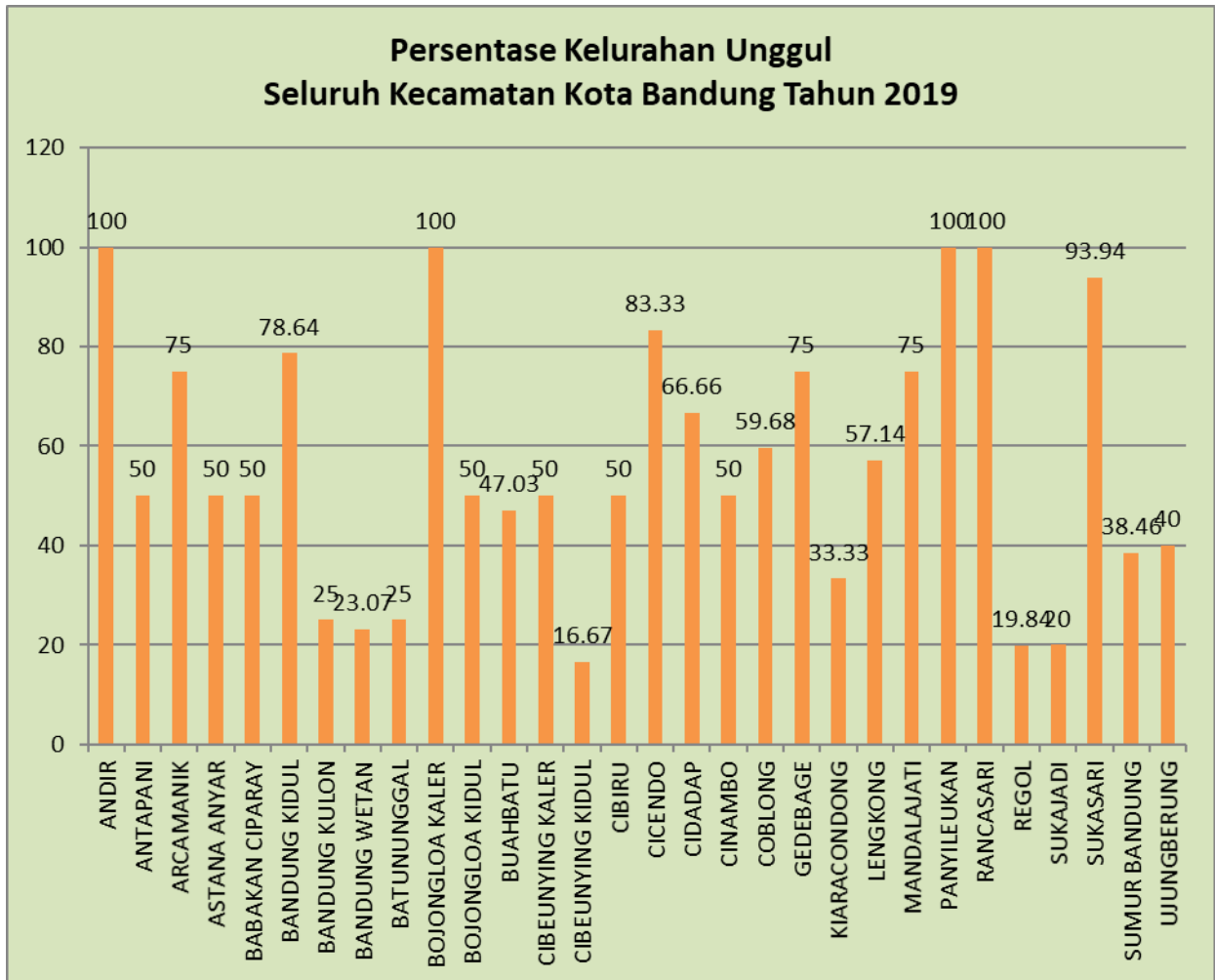


NO	KECAMATAN	Persentase Kelurahan Unggul		
		TARGET	REALISASI	%
16	CICENDO	75	83.33	111.11
17	CIDADAP	33.33	66.66	200.00
18	CINAMBO	50	50	100.00
19	COBLONG	58.89	59.68	101.34
20	GEDE BAGE	75	75	100.00
21	KIARACONDONG	33.33	33.33	100.00
22	LENGKONG	30	57.14	190.47
23	MANDALAJATI	50	75	150.00
24	CIBEUNYING KALER	50	100	200.00
25	RANCASARI	75	100	133.33
26	REGOL	19.84	19.84	100.00
27	SUKAJADI	20	20	100.00
28	SUMUR BANDUNG	25	93.94	375.76
29	SUKASARI	25	38.46	153.84
30	UJUNG BERUNG	40	40	100.00

Berdasarkan data di atas di ketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Persentase Kelurahan Unggul pada Kecamatan Cibeunying Kaler menempati urutan ke-18 diantara 30 Kecamatan di Kota Bandung yaitu sebesar 50% sedangkan nilai tertinggi capaian indikator kinerja IKM dari 30 kecamatan di Kota Bandung adalah sebesar 100% yaitu Kecamatan Andir, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kaler dan Rancasari dan yang terendah yaitu 16.67 Kecamatan Cibeunying Kidul.

Data perbandingan nilai Persentase Kelurahan Unggul dari seluruh Kecamatan di Kota Bandung dapat dilihat dalam bentuk diagram dibawah ini:

Gambar 3.
Diagram Persentase Kelurahan Unggul
Seluruh Kecamatan Kota Bandung Tahun 2019



Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	23.1	14.82	64.16	24.30			24.60			25.01			25.30		

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 1 indikator yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul. Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul" adalah sebesar 14.82 dari target sebesar 23.1 yang



direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 64.16 %, capaian ini kurang dari target yang diperjanjikan.

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\% RW \text{ Unggul} + \% PKK \text{ Unggul} + \% Karang \text{ Taruna} \text{ Unggul} + \% LPM \text{ Unggul}}{4}$$

Pengukuran % RW Unggul dilakukan dengan penilaian dari terpenuhi atau tidaknya beberapa kriteria Metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan 5 dari 21 Kriteria RW Juara.

(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)

Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :

1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga
2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah
3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R
4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester
5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna
6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya

50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :

1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif
2. Urban Farming
3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)
4. Laporan RW tepat waktu minimal form A :
 - a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)
 - b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)
 - c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni
5. Koperasi di Sarana ibadah



- a. Memiliki Anggota
 - b. Memiliki Kepengurusan
 - c. Memiliki AD/ART
6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :
- a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah
 - b. Kegiatan pengajian
 - c. Mengaktifkan remaja masjid
 - d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi
7. RW berdaya
- a. Ada kepengurusan
 - b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)
 - c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)
8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)
9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;
10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat
11. Taman Tematik ramah disabilitas
12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;
13. 50 Penanaman Pohon
14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;
15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;
16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;
17. Kelompok Lansia Sehat;
18. Posyandu Purnama;
- a. Kegiatan lebih dari 8 kali
 - b. Kader lebih dari 5 orang
 - c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % :
 - KIA
 - KB
 - Imunisasi
 - Gizi
 - Pencegahan dan Penanggulangan Diare
 - d. Ada Dana sehat
19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;
20. Siskamling Aktif

Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :



1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK
2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna
3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan
4. Sosialisasi bina keluarga
5. Sosialisasi ketertiban lingkungan
6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK
7. Koperasi PKK
8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah
9. Pembinaan Posyandu

Kriteria Karang Taruna Unggul: Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :

1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna
2. Membentuk dan melaksanakan Kagana
3. Melakukan pelatihan UED SP
4. Melakukan sosialisasi TTG
5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah
6. Pendataan PMKS dan PSKS
7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana
8. Event Olah raga
9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)

Kriteria LPM Unggul: Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :

1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna
2. Melaksanakan pembinaan RW siaga
3. Melaksanakan BBGRM
4. Pendataan profil kelurahan
5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan
6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan)
7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna.
Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW



Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Tingkat pemberdayaan Kemasyarakatan Unggul ada dalam lampiran.

Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah realisasi sebesar 14.86 % dari target sebesar 23.1 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 64.16 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.3.11

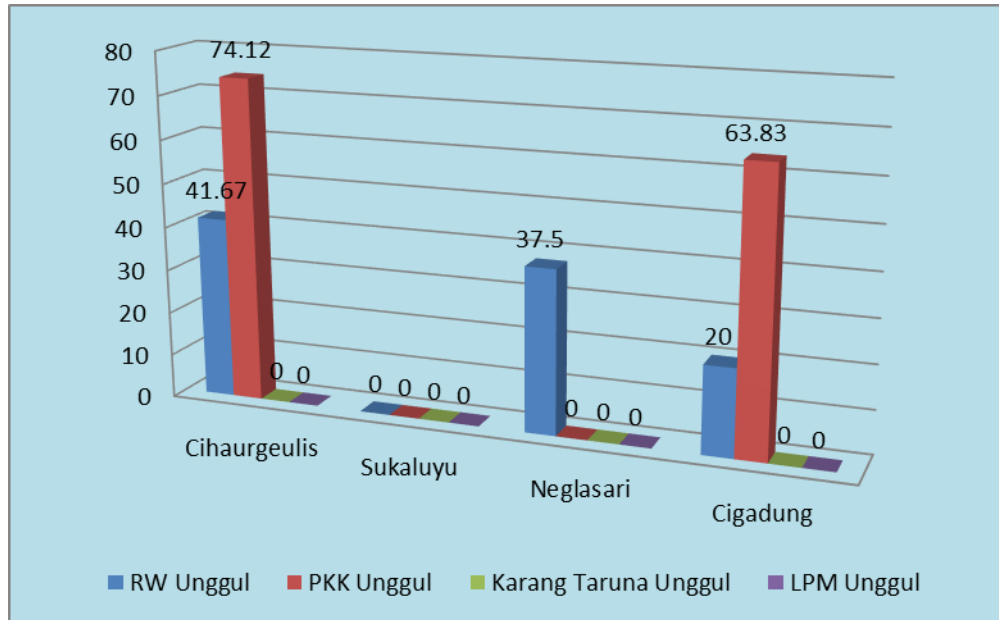
Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Cibeunying Kaler
Tahun 2019

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)				
		% RW UNGGUL	% PKK UNGGUL	% KARANG UNGGUL	% LPM UNGGUL	RATA - RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cihaurgeulis	41.67	74.12	0.00	0.00	28.95
2	Sukaluyu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Neglasari	37.50	0.00	0.00	0.00	9.38
4	Cigadung	20.00	63.83	0.00	0.00	20.96
RATA RATA PER UNSUR		24.79	34.49	0.00	0.00	14.82
Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan						

Sumber data : Kelurahan se- Kecamatan Cibeunying Kaler

Grafik. 3.3.6

**Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Cibeunying Kaler
Tahun 2019**



Dari tabel dan grafik Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan grafik diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terendah hal ini bervariasi kinerjanya yang telah dilaksanakan 4 kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler.

Data tertinggi pada tabel diatas pada Kelurahan Cihaurgeulis dimana tingkat pemberdayaannya mencapai 28,95 % .

Data terendah pada tabel dan grafik diatas pada kelurahan Sukaluyu yang tidak mencapai RW unggul mapupun PKK, Karang Taruna dan LPM Unggul. Lembaga kemasyarakatan kelurahan ini tetap mengakomodir kegiatan yang menunjang tercapainya Janji Walikota/RPJMD akan tetapi tidak mencapai persentase ketentuan formulasi yang terdapat dalam IKU Kecamatan Cibeunying Kaler.

Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja indikator tingkat pemberdayaan kemasyarakatan unggul tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tingkat pemberdayaan tahun 2018 karena ada perbedaan cara penghitungan. Sehingga target dan realisasinya juga tidak bisa dibandingkan.

Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila capaian kinerja nyata tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang realisasi sebesar 14.82 % dari target sebesar



23.1 % dengan capaian 64.16 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target akhir renstra 25.30 % dan capaian 14.82 % maka capaian kinerjanya mencapai 58.58 %. sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan untuk target Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2020.

Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Bila capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tahun 2019 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :

Tabel 3.3.13

Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Persentase Tingkat Pemberdayaan Kemasyarakatan Unggul		
		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	ANDIR	33.33	65.83	197.51
2	ANTAPANI	80	88.49	110.61
3	ARCAMANIK	80	94.82	118.53
4	ASTANAANYAR	54	54	100.00
5	BABAKAN CIPARAY	78.5	92.31	117.59
6	BANDUNG KIDUL	45	48.93	108.73
7	BANDUNG KULON	83	83.17	100.20
8	BANDUNG WETAN	11.61	9.91	85.36
9	BATUNUNGGAL	25.78	69.8	270.75
10	BOJONGLOA KALER	50	64.79	129.58
11	BOJONGLOA KIDUL	21.45	21.45	100.00
12	BUAH BATU	25	44.8	179.20
13	CIBEUNYING KALER	23.1	14.82	64.16
14	CIBEUNYING KIDUL	15.71	77.64	494.21
15	CIBIRU	60	62.12	103.53
16	CICENDO	81.5	91.07	111.74
17	CIDADAP	25.28	50.63	200.28
18	CINAMBO	82	82	100.00



NO	KECAMATAN	Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Unggul		
		TARGET	REALISASI	%
19	COBLONG	78.99	89.4	113.18
20	GEDE BAGE	25	64.88	259.52
21	KIARACONDONG	38.65	38.65	100.00
22	LENGKONG	25	70.11	280.44
23	MANDALAJATI	17.92	26.9	150.11
24	CIBEUNYING KALER	24.87	24.87	100.00
25	RANCASARI	75	78.30	104.40
26	REGOL	13.31	13.31	100.00
27	SUKAJADI	70	95.43	136.33
28	SUMUR BANDUNG	80	98.79	123.49
29	SUKASARI	24.87	52.08	209.41
30	UJUNG BERUNG	38.55	31.46	81.61

Bila melihat tabel dan grafik untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul dibandingkan dengan kecamatan lain bervariasi sehingga dari tabel dapat dilihat menduduki rangking 1 sampai dengan rangking 30. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- Banyaknya RW dan kelurahan dari masing masing kecamatan
- Tingkat Perencanaan kegiatan yang belum maksimal hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari 30 kecamatan terdapat 22 kecamatan yang capaiannya melebihi 100 %

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Perencanaan sudah sebagian terpilah dalam sub kegiatan

Faktor Penghambat :

1. Sebagian ASN tidak paham akan indikator kinerja masing-masing. Untuk meningkatkan capaian indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyaratan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas.



maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan
2. Dapat lebih mengarahkan kembali kepada pejabat struktural baik di kecamatan maupun dikelurahan dalam membuat perencanaan anggaran yang dapat mendukung pencapaian IKI dan mendukung tercapainya RPJMD.

A. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cibeunying Kaler dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Cibeunying Kaler dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **29.803.326.352,81,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **28.498.675.588,00,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,62 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.14

Realisasi Anggaran Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2019

	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.779.782.666,56	10.463.001.886	97,06
BELANJA LANGSUNG	19.023.543.686,25	18.035.673.702	94,81
BELANJA	29.803.326.352,81	28.498.675.588	95,62

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibeunying



Kaler Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **29.803.326.352.81** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **28.498.675.588**, atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,62 %.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2020

Camat Cibeunying Kaler

Drs. SUARDI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19690514 18903 1 004